



Dorong Pengetatan Izin

ANGGOTA DPD RI, Ahmad Syauqi Suratno, mengapresiasi langkah cepat Pemkot Yogyakarta dalam menangani kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Little Aresha Daycare.

Senator dari daerah pemilihan DIY itu menilai, Pemkot Yogyakarta telah menunjukkan komitmen serius dengan menyusun langkah penanganan yang terukur, mulai dari jangka pendek hingga panjang.

"Kami sudah bertemu dengan Pak Wali Kota (Hasto Wardoyo) beserta jajaran kemarin Selasa (5/5). Beliau memaparkan semua upaya yang telah dilakukan, termasuk pembentukan

tim untuk langkah jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang dalam konteks regulasi," ujarnya, Jumat (8/5).

Menurutnya, kasus Little Aresha Daycare menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk membedah persoalan mendasar terkait perlindungan anak. Ia pun menekankan tiga poin utama yang harus dikawal, yakni penindakan hukum, rehabilitasi psikologi korban, dan evaluasi sistem pembelajaran ke depan.

● ke halaman 7

Dorong Pengetatan

● Sambungan Hal 1

Sebelumnya, Syauqi juga telah mendatangi Polresta Yogyakarta untuk memastikan proses hukum terhadap pengelola daycare tersebut berjalan sesuai aturan. Sebagaimana diketahui, Little Aresha Daycare kini telah ditutup permanen dan dipasang garis polisi sejak penggerebekan pada 24 April 2026 lalu.

"Maka, kami juga menyambangi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memastikan rehabilitasi mental, pengelolaan daycare sejenis, hingga upaya pencegahan dilakukan dengan cara yang tepat," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pihaknya juga mendorong agar pemerintah daerah lebih kreatif

dalam menyusun regulasi pengawasan daycare, meski secara hierarki peraturan di tingkat atas belum sepenuhnya selaras.

Ia berharap Kota Yogyakarta bisa melahirkan konsep daycare baru yang lebih terencana, terukur, transparan, dan akuntabel sehingga orang tua merasa aman saat menitipkan anak. "Jangan sampai ada lagi kejadian semacam ini. Kita dorong supaya ada regulasi yang memungkinkan pengawasan lebih ketat. Kepentingan anak harus terlindungi, dan kepentingan sosial masyarakat tetap terjaga," tegasnya.

Dijelaskan, data yang dihimpun dari rangkaian kunjungan tersebut, nantinya akan dirangkum DPD RI sebagai bahan masukan untuk mengundang kementeri-

an terkait. Tujuannya adalah merumuskan regulasi nasional yang lebih kuat dalam melindungi anak-anak di tengah perubahan budaya masyarakat saat ini.

"Semoga dalam waktu tidak lama, proses hukum segera tuntas, dan rehabilitasi psikososial bagi para korban terus berjalan maksimal," terang Syauqi.

Wali Kota Yogyakarta, Hastu Wardoyo, menyampaikan penanganan kasus kekerasan pada anak dibagi secara jelas antara aspek hukum dan kemanusiaan. Proses hukum ditangani aparat kepolisian, kemudian di sisi lain digulirkan pula pendampingan hukum dari Pemkot, sekaligus upaya-upaya pemulihan korban.

"Proses hukum ditangani kepolisian, sementara kami menangani aspek kema-

nusiaan. Ini kami bagi lagi menjadi dua, yakni penanganan mental dan kesehatan, baik bagi anak maupun orang tua," jelasnya.

Dari sisi mental, Pemkot memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban yang mengalami perubahan perilaku, sekaligus kepada orang tua yang terdampak secara emosional.

Sementara dari sisi kesehatan, penanganan dilakukan seiring temuan dampak pengasuhan yang tidak tepat dan mempengaruhi kondisi fisik anak.

"Gangguan perkembangan berkaitan dengan aspek mental anak, sedangkan gangguan pertumbuhan berdampak pada kondisi fisik. Kedua hal ini menjadi fokus intervensi dalam proses pemulihan korban," urai Hastu. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005